

Judul : Bencana alam hancurkan fasilitas pendidikan: hak pendidikan anak terancam
Tanggal : Kamis, 04 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Bencana Alam Hancurkan Fasilitas Pendidikan Hak Pendidikan Anak Terancam

Bencana alam yang terjadi di Sumatera menjadi perhatian serius. Banyak bangunan rusak, termasuk sekolah. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu melakukan kebijakan agar proses belajar tetap berlangsung.

Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan proses

pemetaan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana alam di Sumatera. "Sebagian sudah dimulai untuk tenda belajar darurat," ujar Abdul Mu'ti kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (3/12/2025).

Merespons kondisi krisis ini, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera

mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi. Dia menegaskan, bahwa pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

"Menyelamatkan tempat belajar sama artinya dengan menyelamatkan kelangsungan

masa depan generasi muda yang terdampak musibah," ungkap Fikri Faqih di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, hak pendidikan anak-anak harus segera terpenuhi. Menurut dia, dengan fasilitas terbatas, proses pembelajaran bisa dilakukan di tenda darurat atau tempat pengungsian.

"Saya yakin yang rusak ribuan dari akumulasi beberapa wilayah. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah kelas-kelas darurat," ujar Satriwan kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (3/12/2025).

Untuk mengetahui pandangan dari Abdul Fikri Faqih dan Satriwan Salim mengenai penanganan di sektor pendidikan pada bencana alam di Sumatera, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH,
Anggota Komisi X DPR

Perlu Langkah Darurat Selamatkan Pendidikan



“Kami mendorong penyediaan fasilitas sekolah darurat sesegera mungkin, namun dengan catatan harus memperhatikan kondisi psikologis siswa.

Bagaimana Anda melihat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera?

Bencana alam banjir dan tanah longsor yang merajalela tiga provinsi di Pulau Sumatera menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan, dengan catatan kerusakan berat mencapai 1.009 sekolah. Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat tempat belajar, karena pendidikan itu menyipakan masa depan anak-anak.

Jumlah sekolah yang rusak sangat banyak, lantas apakah ini bisa segera dipulihkan?

Memang revitalisasi seribu lebih sekolah yang rusak membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.

Solusi dari Anda?

Kami mendorong kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses dana *on call* atau Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup, maka Kemendikdasmen

perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran *recalling* bencana.

Jadi harus bersinergi ya antar kementerian dan lembaga?

Iya, tentunya sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan tiga Pemerintah Daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Langkah cepat yang bisa dilakukan seperti apa?

Kami mendorong penyediaan fasilitas sekolah darurat sesegera mungkin, namun dengan catatan harus memperhatikan kondisi psikologis siswa. Kami mengingatkan, bahwa sebelum memulai proses belajar mengajar, asesmen terhadap trauma siswa harus dilakukan terlebih dahulu.

Selain itu?

Kemendikdasmen juga harus menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya *trauma healing*. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pemulihan psikologis siswa.

Menurut Anda, lembaga mana saja yang dapat dilibatkan dalam pemulihan bencana alam ini, khususnya di sektor pendidikan?

Kemendikdasmen bisa menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknas) untuk menerapkan metode trauma healing yang efektif. Salah satunya melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah sekolah darurat. Sebagai alternatif metode pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur, bisa juga penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kondisi listrik dan internetnya kan belum pulih, bagaimana itu?

Iya, mengingat jaringan internet dan fasilitas penunjang di lokasi bencana kemungkinan besar lumpuh. Pemerintah diminta proaktif menyediakan modul fisik yang relevan bagi siswa. PJJ ini bisa menjadi solusi sementara. Mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, Pemerintah perlu menyiapkan modul modul belajar yang relevan. DPR saat ini tengah serius membahas mitigasi pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). ■ *NNM*

SATRIWAN SALIM,
Koordinator Nasional P2G

Segera Dibangun Kelas-kelas Darurat



“Jangka pendeknya adalah, anak-anak tersebut diselamatkan dan diberikan hak pendidikan mereka di tenda-tenda darurat.

Bagaimana pandangan Anda dengan bencana alam di Sumatera dan dampaknya ke sektor pendidikan?

Indonesia kan secara geografis ada potensi yang bisa terjadinya bencana yang benar-benar dari alam. Serta bencana ekologi karena kebijakan kebijakan yang dibuat. Kami sih berharap Pemerintah sudah punya perhatian terhadap wilayah mana saja yang sudah terjadi bencana atau berpotensi bencana dan bencananya seperti apa. Setelah pemetaan itu dilakukan, Pemerintah harus punya data di situ.

Data apa saja itu?

Misalnya data terkait sebagai sebuah kebijakan, apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah di setiap wilayah di Indonesia ketika terjadi bencana alam. Karena ini bukan kali pertama terjadi. Data data itu semua seharusnya sudah ada.

Apa saja yang harus dipetakan?

Pertama, berapa jumlah sekolah. Saya yakin ribuan sekolah yang terdampak. Untuk itu, yang dibutuhkan kelas-kelas darurat, seperti tenda atau hunian sementara, walaupun kondisinya darurat. Setelah dipetakan wilayah titik-titik mana saja yang

terkena bencana. Jangan sampai, titik yang dibuka untuk tenda darurat pembelajaran anak-anak itu adalah tempat yang juga berpotensi terjadinya bencana longsor atau banjir.

Kalau dari anggarannya bagaimana menurut Anda?

Harus ada relokasi anggaran di Kemendikdasmen, di Kementerian Agama, termasuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian lembaga terkait. Kami berikhtirnya, bagaimana anak-anak yang selamat bisa mendapatkan hak haknya di bidang pendidikan.

Untuk bangunan sekolah, apakah ini harus menjadi prioritas?

Revitalisasi setelah terjadinya bencana seperti bangunan sekolah itu wajib. Tapi itu jangka panjang. Jangka pendeknya adalah, anak-anak tersebut diselamatkan dan diberikan hak pendidikan mereka di tenda-tenda darurat. Bisa juga berkolaborasi dengan mahasiswa mahasiswa kependidikan. Sehingga mahasiswa tersebut bisa menjadi tenaga pendidikan darurat juga.

Selain itu, apalagi?

Nah harus didata juga soal kebutuhan untuk belajarnya. Misalnya alat tulis, papan tulis, buku, baju, sepatu dan tas. Karena semua itu pastinya sudah hancur. Ini harus segera dilakukan inventarisasi dan selanjutnya didistribusikan.

Lantas, apakah proses pembelajaran bisa berjalan normal atau harus ada kebijakan khusus?

Minggu minggu ini di berbagai daerah sedang dilakukan *Assesment Akhir Semester*. Nah ini harus bisa disesuaikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Jadi, Kemendikdasmen harus memberikan fleksibilitas atau kelonggaran sehingga anak-anak tidak harus melakukan ujian secara rangin.

Ada usulan dari Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih agar dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan setuju?

Pertanyaannya adalah, apakah listrik dan internetnya ada. Apakah gawainya mereka ada. Karena kalau PJJ, utamanya adalah listrik, internet dan gawainya. Saya rasa listrik dan internet juga susah saat ini. Kami pikir itu tidak akan efektif. Orang tuanya boro-boro berfikir PJJ, mereka justru berfikir keselamatan mereka. ■ *NNM*